



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jalan Pegangsaan Timur No.1, Menteng, Jakarta 10320  
Telepon/Faksimili: (021) 21390445; E-mail: tu-pusdatin@esdm.go.id

---

## **NOTULENSI**

### **RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN EITI 2018**

#### **A. Pendahuluan**

##### **a. Gambaran Umum**

Kegiatan rapat tim pelaksana diadakan dalam rangka untuk persetujuan laporan EITI 2018 untuk memenuhi persyaratan dalam standar EITI

Acara rapat persetujuan laporan EITI 2018 ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, SKK Migas
2. Perusahaan dan Asosiasi: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
3. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

##### **b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan rapat ini adalah untuk mendapatkan persetujuan laporan EITI 2018 yang telah disusun sejak bulan Agustus 2020

c. Dasar

Undangan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor  
18.Und/DI.02/SJN.D/2021 tanggal 3 Februari 2021

**B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Rapat tim pelaksana dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2021 secara virtual. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam (SDA) KESDM, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, perwakilan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI), Asosiasi Petroleum Indonesia (API)

**C. Pemaparan dan Diskusi**

**Sekretaris Jenderal ESDM**

Assalamualaykum wr. wb, Pada transformasi kelembagaan EITI yang terjadi dan dengan keterbatasan waktu yang ada, sekretariat transisi pelaporan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah dari Industri ekstraktif yang kami bentuk telah menyelesaikan penyusunan Laporan EITI Indonesia ke 8, dengan mengikuti guideline standard dari flexible reporting EITI.

Dalam waktu dekat ini, target yang harus kita penuhi yaitu publikasi laporan EITI ke 8 pada akhir Maret 2021. Terkait atas hal tersebut, Sekretariat transisi EITI Indonesia yang dikoordinir KESDM dengan arahan Menteri ESDM dan di monitor oleh Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terus bekerja untuk mencapai target dan menjaga penilaian dari EITI International.

Pada kesempatan kali ini, setelah sambutan saya tim akan memaparkan isi Laporan EITI ke 8. Intinya kami ingin mendengar masukan dari Bapak/Ibu sekalian dari laporan EITI kita. Secara umum penyusunan laporan ini telah memenuhi standar persyaratan EITI Standard 2019 seperti: Requirement 2.1 - 2.6; Requirement 3.1-3.3; Requirement 4.5, 5.1-5.3 dan Requirement 6.1-6.3. Untuk memenuhi persyaratan publikasi laporan, rewiuw dan masukan dari laporan yang telah disusun oleh Bapak/Ibu yang mewakili konstituen dari

berbagai pihak. Kami akan memberikan waktu hingga 21 Februari apabila masih ada masukan dan koreksi terhadap finalisasi laporan ini.

Selain terkait laporan EITI tersebut diatas, pada kesempatan ini, kami juga ingin mengusulkan agenda kerja forum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah tahun 2021. Tahun 2020. terdapat dua pokok utama kegiatan yaitu: Penyusunan Laporan EITI Indonesia ke 9 tahun 2021 beserta publikasinya, serta Implementasi Langkah Pengarusutamaan atau melembagakan pelaporan/pengungkapan transparansi atas pendapatan negara dan pendapatan daerah pada proses bisnis pengelolaan Industri ekstraktif di Indonesia yang berjalan. Intinya finalisasi laporan EITI ke 8 dapat berjalan lancar dan baik.

Dengan mengucap Bismilahirahmannirrahim rapat konsultasi MSG ini dibuka.

Wassalamualaykum wr.wb

### **SAM SDA - Sampe Purba**

Bapak dan Ibu sekalian, salah satu proses yang dilalui sebelum report ini akan dipublish adalah mendapat masukan dari MSG kemudian berkoordinasi dengan tim Sekretariat EITI pusat, baru setelah mendapatkan masukan dan komen baru akan disampaikan kepada board.

Terkait dengan BO kita mendapat apresiasi terutama kita sudah lakukan sangat luas dan komplit terutama di sektor minerba, namun masih ada hal yang perlu dikerjakan terutama di sektor migas. Kita sudah pastikan standard yang diminta EITI sudah inline dengan peraturan nasional,

Terkait dengan contract disclosure, kita masih menunggu kira kira seperti apa yang sudah apply terutama di negara-negara implementing countries. Perusahaan yang bekerja di implementing countries dapat memberikan benchmark untuk masalah ini.

Validasi report telah disepakati validasi report untuk Indonesia pada 2023, namun sebelum menuju kesana perlu ada konsultasi dengan MSG dan kelompok masyarakat sipil.

Pada tanggal 17-18 Februari akan ada board meeting dan hasilnya akan diupdate kembali kepada Bapak Ibu.

### **Dirjen Minerba**

Dari saya dapat laporan tampaknya sudah cukup bagus dari sektor minerba, secara substansial saya mengikuti dulu dan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

### **Kemenko Marives**

Kemenko Marives berkomitmen mendukung penyusunan laporan EITI baik terkait Data maupun pendanaan.

### **KemenkoMaritiman**

Kami terus mendukung pelaporan ini, semoga laporan cepat selesai dan cepat diupload sesuai ketentuan dari EITI International

### **PWYP – Aryanto Nugroho**

Kami sangat menyambut baik progres pelaporan EITI, secara terus akan memberikan masukan. Saya juga menyambut baik peran aktif Indonesia dalam rapat dewan board internasional. Saya ikut senang karena Indonesia diapresiasi terkait dengan BO, karena kami juga menjadi salah satu partner Stranas KPK. Terkait dengan jadwal rapat board EITI International, ada satu hal yang belum dicermati yaitu posisi Indonesia terhadap Myanmar. Isu tersebut akan menjadi bahasan dalam *board International*. Saran saya dalam perspektif masyarakat sipil adalah adanya penghargaan konteks demokrasi dan HAM serta jaminan masyarakat sipil dalam partisipasi kegiatan transparansi. Namun hal ini perlu juga dikomunikasikan juga dengan Kementerian Luar Negeri.

Kami juga mohon jadwal pembahasan kelembagaan MSG yang saat ini sedang dalam pembahasan karena saat ini kami juga dalam proses pemilihan kepengurusan baru sehingga diharapkan nanti tetap ada keterlibatan masyarakat sipil di dalam MSG.

Perlu didiskusikan apakah memang di tahun ini hanya akan publish laporan kontekstual, dan perlu juga mempertimbangkan masalah gender.

### **Tanggapan SAM SDA**

Terkait dengan Myanmar memang akan dibahas pada rapat yang dilakukan untuk regional Asia. Dalam rapat yang dilakukan dengan sekretariat, betul di

regulasi 8.1 dan 8.2 mengenai suspension suatu negara apabila di negara tersebut terjadi kendala. *Chair* dari EITI juga telah menyampaikan

### **APBI**

APBI akan mendukung pelaporan EITI, dan meminta diberikan waktu agar dapat mereview laporan yang telah disusun.

Banyak perusahaan yang terdapat di dalam daftar survey yang tidak masuk ke dalam keanggotaan APBI. Dengan adanya Undang Undang yang baru, diharapkan hal ini dapat menjadi momentum bagi APBI untuk mendata ulang keanggotaan perusahaan yang ada.

### **Dinas ESDM Provinsi Jatim - Puguh Sujatmiko**

Laporan ini pada prinsipnya kami support, saya belum tau mekanismenya jika tim tidak bisa ke daerah. Dengan UU baru, sebenarnya data data yang IUP sudah kami kirimkan ke ESDM dengan status yang ada.

### **IMA - Djoko Widajatno**

Industri tambang adalah mineral dan batubara, Diharapkan Indonesia dapat memberikan data-data yang akurat dan menyeluruh.

Perlu dipastikan bahwa pelaporan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar EITI.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap tim yang sudah bekerja, sehingga kita masih dalam track untuk memenuhi standart EITI.

Terkait BMN, ini menjadi masalah pelik untuk generasi I, karena banyak barang barang tersebut juga sudah berantakan dan rusak. Perlu dievaluasi kembali, meskipun pada tahun 2009 sudah dilakukan.

Bab VII ada satu lagi yang cukup kritis mengenai good government yang perlu ditampilkan.

### **Kementerian BUMN**

Prinsipnya kami siap mendukung dan menindaklanjuti arahan yang sudah disampaikan

### **Tim Sekretariat**

Menyampaikan progres yang sudah dilakukan dalam penyusunan laporan EITI ke 8. Saat ini proses penyusunan laporan sudah sesuai dengan panduan flexible report dan kesepakatan MSG. Proses penerjemahan juga sudah dilakukan ke dalam Bahasa Inggris. Struktur laporan terdiri dari 9 Bab dan ini sudah disepakati pada pertemuan MSG sebelumnya, untuk memenuhi syarat penilaian kami juga memasukan sejumlah persyaratan oleh tim Sekretariat EITI Internasional. Bab II terdiri dari kegiatan industri ekstraktif sektor migas dan minerba, Bab III terdiri dari landasan konstitusional sektor migas dan minerba, Bab IV berisi implementasi industri ekstraktif di Indonesia meliputi berapa besar kontribusi industri ekstraktif di Indonesia, Bab V berisi penerimaan dan alokasi pendapatan, Bab VI membahas Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi, Bab VII berisi tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bab VIII terkait dampak pandemic covid-19 pada industri ekstraktif, dan Bab IX berisi reformasi kebijakan industri ekstraktif.

Terkait dengan kaporan perusahaan, saat ini masih minim. Dari 122 perusahaan di sektor minerba, 52 sudah mengembalikan, 70 belum. Sedangkan untuk migas, dari 85 perusahaan, 78 sudah mengembalikan, 7 belum. Saat ini laporan ini masih kami olah karena sejumlah perusahaan mengirimkan laporan dalam bentuk pdf.

Website EITI sudah dapat diakses di [eiti.esdm.go.id](http://eiti.esdm.go.id), untuk layanan kompliance sudah bisa melalui email [sekretariat@esdm.go.id](mailto:sekretariat@esdm.go.id)

Sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dampak covid yang memang belum lengkap dan terkait dengan pembahasan gender ketersediaan data juga sangat minim. Kami mohon masukan terutama dari asosiasi jika memiliki data datanya untuk kami masukan di dalam laporan Disampaikan juga rencana kerja 2021 yang terdiri dari kegiatan penyusunan dan publikasi laporan EITI-8 2020, penyusunan laporan EITI-9 2021, dan implementasi langkah pengarus-utamaan yang dilakukan bersama dengan world bank.

### **Tanggapan Kapusdatin**

Laporan yang perlu divalidasi adalah terkait dengan pendapatan dan beberapa kewajiban industri ekstraktif dikaitkan dengan laporan yang telah

audited. Namun dalam fleksible report dengan kondisi pandemic saat ini kita melaporkan perkembangan terkini dari industri ekstraktif terutama masalah kebijakan termasuk perkembangan UU 3 dan persiapan PPnya, serta reformasi yang dilakukan sehingga industri ekstraktif masih bisa memberikan manfaat dan menarik bagi investor global.

Fokus untuk 2021 direncanakan untuk melakukan self validation terhadap laporan yang telah disusun. Yang harus dilakukan adalah implementasi mainstreaming baik di Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah. Apabila ini sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi disusun laporan tertulis karena seluruhnya dapat diakses secara online.

### **Tanggapan PWYP – Aryanto Nugroho**

Untuk gender masih levelnya data pilah, bisa berkoordinasi dengan biro perencanaan mengenai anggaran responsive gender di sektor energi dan pertambangan. Selanjutnya di sektor migas disebutkan ada hambatan dan tantangan BMN setelah terminasi perlu ditambahkan rekomendasi yang diperlukan untuk memfollow up untuk menjadi kebijakan. Perlu dimunculkan juga perusahaan yang telah memiliki *sustainable report* untuk menjawab isu lingkungan

Bahan bahan notulen mohon dapat dishare juga entah melalui email atau diupload di website.

### **Tanggapan Kapusdatin**

Terkait dengan lingkungan dan CSR mohon dapat dibantu oleh Asosiasi jangan sampai laporan yang disampaikan berbeda.

### **Tanggapan Ses Ditjen Minerba**

Terkait dengan BMN di sektor minerba hanya berasal dari 8 perusahaan yang memiliki kontrak PKP2B, untuk kontrak karya tidak ada yang berstatus BMN. Kami akan mengirim tabel perusahaan yang belum mengirim questionnaire EITI diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh IMA dan APBI

Tanggapan Djoko Widajatno-IMA

Menambahkan Pak Aryanto mengenai Hingga saat ini keputusan

### **Article 33 - Ermy Ardhyanti**

Soal gender, perlu disampaikan problem segregasi data gender pada perusahaan dan pemerintah.

Saat ini sedang disusun satu data ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan termasuk data segregasi gender. Ini mungkin bisa disampaikan di dalam laporan bahwa sedang dikerjakan dan direkomendasikan untuk laporan berikutnya.

Karena waktu tidak memungkinkan untuk saat ini "mengejar" data gender maka bisa direkomendasikan untuk laporan berikutnya: perusahaan menyusun data segregasi gender (dalam bidang tenaga kerja) dan dampak gender. Dampak gender bisa diambil dari penerima manfaat dari CSR.

Perusahaan dapat mulai menyiapkan data segregasi gender dan di mainstreamkan dengan program CSR.

Usul lainnya adalah mengenai ada atau tidaknya ketersediaan standar anti diskriminasi gender di perusahaan. Serta Komposisi anggota MSG antara laki-laki dan perempuan

### **Tanggapan Dir Tekling Pertambangan ESDM**

Tidak ada perbedaan gender di sektor pertambangan termasuk saat ini ada juga wanita yang mengoperasikan alat alat berat. Sejauh ini pekerjaan yang dilakukan sepenuhnya berbasis kompetensi. Satu yang dilarang adalah wanita yang bekerja di tambang bawah tanah.

### **Tanggapan IMA - Djoko Widajatno**

Kenapa putri tidak boleh bekerja di bawah tanah karena yang dulu yang bekerja di bawah tanah adalah orang yang dirantai yang mungkin akan berbahaya bagi pekerja putri.

## **D. Penutup**

Jika tidak ada masukan lain, terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu.

Kami tunggu masukan tertulisnya.